

Jokowi Sambungan hal 2

Minggu (25/8) tadi malam. Kongres bakal berlangsung hingga Selasa (27/8).

NasDem juga memastikan terus mengawal Jokowi hingga penghujung jabatan. Surya Paloh turut berharap masa bakti Jokowi tetap dijaga untuk kepentingan bangsa dan negara. "Kita mengharapkan agar baktinya tetap berlanjut untuk kepentingan bangsa dan negeri ini," ucap Surya Paloh.

Surya Paloh pun berterima kasih kepada Presiden Jokowi. "Kita harus berterima kasih kepada Pak Jokowi. Anda telah memberikan banyak kepada NasDem. Ini satu pembelajaran politik. Kita belajar dari kepemimpinan Anda sebagai Presiden RI yang hampir 10 tahun," kata Surya Paloh.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan merasa seperti bestialgia kembali saat menghadiri Kongres III Partai NasDem. "Malam ini saya merasa seperti nostalgia kembali. Berdiri di sini, berada dalam satu ruangan dengan Bapak Surya Paloh, dengan Bang Surya dan dengan seluruh kader Partai NasDem dari seluruh tanah air Indonesia. Rasanya, seperti rasa dulu yang pernah ada,"

kata Jokowi.

Jokowi lalu mengenang, Surya Paloh merupakan satu-satunya ketua umum partai politik yang pernah dipayungi oleh dirinya saat hujan deras. "Setelah saya ingat-ingat, baru satu ketua partai yang selama 10 tahun ini dalam keadaan hujan dipayungi Presiden. Hujan deras sekali, saya memayungi Bang Surya. Tapi, katanya karena terlalu basah bajunya beliau agak masuk angin," jelasnya.

Kongres III Partai NasDem mengambil tema 'Sinergi Membangun Bangsa'. Tema itu disebut hasil kristalisasi dari dialog Surya Paloh dengan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Sejumlah tokoh diundang pada Kongres III ini, selain Presiden Jokowi, juga turut diundang presiden terpilih Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kehadiran Anies mendapat sambutan hangat para pengurus dan kader NasDem. Bahkan, sempat dielu-elukan peserta kongres, Anies pun membalasnya dengan melambatkan tangan ke arah mereka. "Pak Anies, Abah," kata para kader NasDem. (Ant/Obi)-f

DPR, Sambungan hal 2

la menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mengawal putusan MK agar diakomodasi dalam peraturan terkait penyelenggaraan Pilkada 2024. "Saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa, kita menegakkan konstitusi dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini," tambahnya.

Rapat dengan pendapat dimulai pukul 10.00 WIB dihadiri Ketua KPU Mochammad Affuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Hedy Lugito, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan perwakilan Kemendagri.

Dalam RDP itu, Komisi II DPR bersama KPU RI dan pemerintah menyepakati PKPU No 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang di dalamnya mengakomodasi secara utuh putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 dan No 70/PUU-XXII/2024.

Sebelumnya, Kamis (22/8), DPR RI membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Rapat paripurna dengan agenda

pengesahan RUU Pilkada ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai quorum menyusul unjukrasa di berbagai daerah yang menolak RUU Pilkada.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dan pemerintah. Pembahasan itu dinilai tak sesuai Putusan MK yang diputuskan Selasa (20/8) terkait dengan pilkada, yakni Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 dan No 70/PUU-XXII/2024.

Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Adapun Putusan MK No 70/PUU-XXII/2024 menegaskan, batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU. Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya yang menyebut, batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik. (Ant/Obi)-f

Prabowo Sambungan hal 2

Sebelumnya, Zulkifli Hasan secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP PAN periode 2024-2029.

Wakil Ketua Umum DPP PAN sekaligus Ketua Steering Committee Kongres Ke-6 PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, pe-

netapan ketua umum DPP PAN terpilih itu sudah melalui sidang pleno satu sampai pleno enam. Oleh karena itu, Zulhas secara aklamasi ditetapkan menjadi Ketua Umum DPP PAN periode 2024-2029. (Ant)-f

Banjir Sambungan hal 2

la memastikan, tim di lapangan sedang melakukan proses identifikasi terhadap 13 orang korban meninggal dunia untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga.

Abdul Muhari menyatakan, jumlah korban dapat berkembang seiring proses pencarian yang masih dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri personel BPBD, Basamas,

TNI/Polri, dan Palang Merah.

Tim SAR dari Brimob Polda Maluku Utara (Malut) mengerahkan 150 personel untuk membantu dan menyelamatkan korban banjir. Kabid Humas Polda Malut Kombes Pol Bambang Suharyono menyampaikan, sekitar 30 unit rumah warga dilaporkan tertimbun lumpur dengan ketinggian mencapai

1-4 meter.

Tim SAR Gabungan terus bekerja mencari dan menyelamatkan korban yang diduga tertimbun lumpur. Situasi di lokasi banjir masih dalam pengawasan ketat, dan upaya penyelamatan serta pemulihannya terus dilakukan secara intensif. (Ant/San)-f

Camaba Sambungan hal 2

Hal ini dapat diterjemahkan bahwa seberapa besar sebuah tindakan berimplik pada aspek ekonomi. Sebagai contoh misalnya apakah mengambil pendidikan tinggi akan berefek langsung pada naiknya peluang kerja, tetapi dianggap lebih mudah digapai. Itu sebabnya dalam beberapa konteks pendidikan tinggi yang dianggap njiilmet, contohnya pendidikan keteknikan, tidak terlalu diminati.

Sebagai native digital, gen Z sangat dipengaruhi teknologi digital, dalam berinteraksi dalam berbagai kegiatan misal komunikasi, belajar, dan bekerja. Berbagai platform sosial yang berbasis, bahkan dipakai untuk membentuk identitas diri, berbagi pendapat. Itu sebabnya media sosial online dan komunitasnya sangat berpengaruh pada pola pengambilan keputusan mereka.

Dengan mengamati data masih tingginya potensi gen z sebagai calon mahasiswa baru dan adanya kecenderungan menurunnya jumlah pendaftar perguruan tinggi swasta nampaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sisi PTS. Di antaranya, yang cukup signifikan untuk dipertimbangkan adalah penggunaan me-

dia digital.

PTS perlu aktif di platform media sosial yang populer di kalangan Gen Z, seperti instagram, tiktok, dan youtube. Walaupun saat ini sudah banyak PTS yang mempergunakan, akan tetapi cara penyampaian masih memakai sudut pandang generasi baby boomer, sehingga masih kurang diminati.

Kondisi ini dapat terlihat sedikitnya follower dan viewer. Karena Gen Z sangat berorientasi pada karir, PTS harus meyakinkan bahwa program mereka dapat membuka peluang kerja secara nyata.

PTS perlu membuat konten menarik dan kreatif agar experience dalam berbagai bentuk produk komunikasi, seperti video testimoni, tur kampus virtual, dan cerita sukses alumni, bisa dirasakan Gen Z sehingga persepsi positif akan muncul.

Mengingat pentingnya pendapat rekan sebaya secara online, PTS dapat memanfaatkan strategi peer-to-peer marketing. Melirik kasus kafe yang laris, rating dan komentar teman online menjadi landasan pembuatan keputusan Gen Z untuk berkunjung ke kafe tersebut.

Situasi tersebut bisa diadopsi PTS misal-

nya dengan program pengenalan kuliah di kampus, di mana calon mahasiswa diberikan experience kuliah, kemudian membagi pengalaman tersebut dengan calon mahasiswa melalui media sosial, webinar, dan acara langsung. Karena informasi online menjadi penting, maka reputasi yang kuat dalam hal kualitas pendidikan, akreditasi, dan keberhasilan lulusan juga harus disampaikan secara konsisten melalui semua saluran yang diakses oleh Gen Z, termasuk situs web resmi, media sosial, WAG dan publikasi kampus.

Hal lain yang tidak boleh ditinggalkan adalah perlunya PTS melakukan inovasi khususnya dalam pendidikan berbasis teknologi yang sangat dibutuhkan oleh Gen Z. Mereka mengharapkan pengalaman pendidikan yang relevan dengan era digital. Ketika PTS tidak mampu menyediakan fasilitas seperti laboratorium digital, program pembelajaran online yang interaktif, dan infrastruktur teknologi lainnya, kemungkinan minat calon mahasiswa dari Gen Z akan menurun.

(Penulis adalah Guru Besar FTI Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY))-f

PKB Sambungan hal 2

"Jadi, PKB itu politiknya ikut kiai, ikut nasihat kiai, ikut petunjuk kiai. Makanya, dinamakan gerakan politik kiai, *harakah siyasiah kiyaiyah* terangnya.

Namun demikian, tegas Wapres, meskipun gerakan PKB mengikuti petunjuk dan nasihat kiai, bukan berarti hal ini semata-mata untuk kepentingan kiai atau warga Nahdliyyin, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara.

"PKB disebutkan sebagai *mathiyatun nahdliyyin*, kendaraan politiknya orang NU. Tapi kenyataannya, yang mendukung PKB bukan hanya orang NU, tapi seluruh kelompok. Kenapa begitu? Karena, politik PKB adalah politik *rahmatan lil 'alamin*, politik untuk semua golongan," ujarnya.

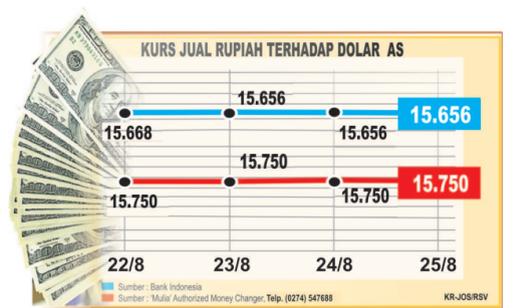
Ketua Umum PKB periode 2024-2029 Muhaimin Iskandar

sempat memperlihatkan tayangan video rapat para kiai untuk memutuskan Ketua Dewan Syura PKB. Menurut Cak Imin, para kiai mengusulkan dan menyetujui KH Ma'rif Amin sebagai Ketua Dewan Syura PKB. "Saya menanyakan kepada muktamirin, apakah usulan ini bisa disetujui?" tanya Cak Imin yang dijawab serempak setuju oleh muktamirin.

Pada bagian lain, Ketum PKB Muhaimin mengatakan, pondasi partainya menuju Pemilu 2029 semakin kuat dengan bergabungnya Wapres KH Ma'rif Amin sebagai Ketua Dewan Syura. Ia menyampaikan pernyataan tersebut dengan membandingkan pelaksanaan Mukhtar VI PKB sebagai simbol kesiapan menyambut Pemilu 2029. (Ati/Ant)-f

Delapan Sambungan hal 2

Partai Garda Republik Indonesia (406.884) dan Partai Kebangkitan Nusantara (326.804). Dalam penjelasannya, Ketua KPU menyebutkan, perhitungan ambang batas 4 persen itu merujuk pada ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang No7 Tahun 2017 (UU Pemilu) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) No 6 Tahun 2024. (Ant/Obi)-f



Prakiraan Cuaca 26 Agustus 2024

Lokasi	Pagi	Siang	Cuaca Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95



Monika Pretty Aprilia, MSi
Dosen Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom
Yogyakarta

PERNAHKAH anda merasa bahwa Indonesia adalah negara yang penuh dengan masalah? Beranggapan bahwa negara barat

Apa Itu Masyarakat Modern?

seperti yang ada di Eropa itu lebih baik dari aspek apapun sehingga negara luar terlihat lebih maju, sejahtera dan cerdas? Apakah memang benar demikian adanya? Atau jangan-jangan kita berpandangan demikian karena kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat dan meletakkan perbedaan antara masalah yang terjadi di negara kita atau di negara barat?

Berbicara tentang barat (baca: Eropa) selalu akan dikaitkan dengan masyarakat modern. Satu aspek yang jarang kita bicarakan terkait dengan negara barat adalah konsumsi terjadi karena ada sistem produksi di sana. Selama ada masyarakat pekerja, maka dengan sendirinya akan ada konsumsi. Di barat, masyarakat bisa mengkonsumsi karena didukung oleh politik ekonominya. Misalnya tentang

upah minimum di sana. Di barat, upah minimum bukan hanya sekedar hitungan jam yang pantas. Upah minimum dibuat karena ada penghitungan dari pemerintah dalam melihat kemampuan masyarakatnya apakah bisa menjalankan sistem yang sudah dibuat, bisa terus berputar dan tidak macet ke depannya. Politik akan selalu terhubung dengan kegiatan ekonomi dan juga memungkinkan adanya keperluan teknologi dan pengetahuan yang memungkinkan produksi tidak hanya di satu bidang tapi juga spesifikasinya produknya. Penyangga utamanya siapa? Ya masyarakat pekerja itu sendiri.

Hal tersebut yang tidak dilihat oleh masyarakat kita. Konsumsi di barat tidak bisa disamakan dengan konsumsi di Indonesia. Di Indonesia sama-sama ada masyarakat

pekerja, tapi pengertiannya berbeda dengan yang ada di barat. Masyarakat pekerja di barat sudah tidak lagi memiliki pertanyaan "besok saya akan makan apa?" karena dari pendapatan yang mereka miliki, sudah bisa dihitung kemampuan konsumsi dalam satu bulan ke depan. Bahkan di sana, berlibur menjadi bagian dari masyarakat pekerja. Sedangkan di sini, tidak ada sistem yang mengatur terkait jumlah jam kerja ataupun liburan. Meskipun jam kerja yang sudah ditempuh sangatlah tinggi tapi kita masih masuk dalam kategori negara miskin. Di sini tidak ada penghitungan yang konkret, bagaimana masyarakat itu disebut miskin.

Indonesia begitu bergantung pada modal negara luar. Negara

luar menjadi penyangga ekonomi dengan berbagai kegiatan produksi. Mereka datang tidak hanya membawa uang tapi juga ideologi. Setelah 1965, modal masuk dari negara non komunis. Ketika ideologi itu gugur pada 1998 terjadi krisis secara global, uang bisa masuk dari negara manapun. Kegiatan yang dilakukan sekarang adalah sepenuhnya pembangunan untuk menjadi modern, sehingga tidak heran bahwa pembangunan infrastruktur menjadi hal yang diutamakan. Perbedaan lainnya antara pekerja di barat bisa berpolitik dengan gerakan buruh sedangkan di sini hal tersebut sangatlah mustahil. Masyarakat dilarang untuk berpolitik sehingga "dijinakkan" dengan produk-produk impor seperti alat elektronik, kendaraan, ponsel dan masih banyak lagi. Mereka yang



menggunakannya serasa sudah naik kelas dan merasa seolah-olah tidak ada yang perlu dipermasalahkan di sini.

Penulis menyampaikan hal ini sebagai ajakan untuk melihat kondisi konkret masyarakat kita. Tidak perlu marah-marah ketika melihat carut marut yang terjadi di sini. Negara barat tidak bisa dibandingkan di Indonesia, ada hal yang tidak bisa disamaratakan kondisinya. Mungkin juga, tidak perlu yang kita ketahui terkait barat itu benar adanya. Jangan-jangan itu semua hanyalah ilusi.

*tulisan ini berangkat dari materi Sekolah Dua Musim yang diprakarsai oleh Dr. Risa Permadani.